

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, peran pelayanan kesehatan menjadi semakin penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berarti mereka memiliki otonomi dalam mengelola keuangan dan sumber daya mereka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Puskesmas didirikan dengan tujuan utama memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi lebih pada peningkatan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tantangan dalam pengelolaan fasilitas kesehatan juga semakin kompleks. Salah satu aspek krusial dalam operasi Puskesmas adalah pengelolaan persediaan obat-obatan, yang merupakan komponen vital dalam memastikan ketersediaan obat bagi pasien. Ketersediaan obat yang memadai dan tepat waktu adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kekurangan obat, kelebihan stok, atau bahkan kerugian finansial.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019 Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga sebagian besar pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan pengelolaan persediaan obat-obatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan persediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan

pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

UPT Puskesmas Pematang Duku, yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, adalah salah satu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang menghadapi tantangan ini. Menurut Laporan Tahunan Puskesmas Pematang Duku (2022) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ditemukan beberapa kasus terkait ketidakefisienan dalam pengelolaan persediaan yang memerlukan intervensi melalui penerapan audit prosedur yang ketat. Referensi yang diberikan mendokumentasikan bahwa belum ada sistem audit independen yang menyeluruh dan sistematis untuk memastikan efisiensi pengelolaan persediaan obat-obatan di puskesmas tersebut.

Persediaan obat-obatan menjadi elemen krusial dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Penanganan persediaan secara efektif dan efisien memastikan ketersediaan obat kapan pun dibutuhkan, menghindari kekurangan stok yang dapat menghambat proses pengobatan, serta meminimalkan risiko penyimpanan obat kadaluwarsa. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang baik dapat berdampak negatif terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan kesehatan.

Proses audit obat-obatan di Puskesmas Pematang Duku biasanya dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan Dinas Kesehatan Bengkalis, tim audit internal yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan setempat atau oleh auditor eksternal yang ditunjuk. Tim ini terdiri dari profesional kesehatan yang memiliki keahlian dibidang manajemen farmasi dan audit, termasuk *apoteker* dan auditor keuangan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur yang terkait dengan pengelolaan obat-obatan, mulai dari pengadaan hingga distribusi dan penyimpanan, dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Audit ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan obat-obatan. Selain itu, audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa stok obat selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dan bahwa prosedur penyimpanan dilakukan dengan benar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan obat. Hasil dari audit ini kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti kepala puskesmas atau dinas kesehatan, untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pada tahun 2021 ditemukan bahwa banyak sekali kasus kekurangan obat yang diakibatkan oleh ketidaktepatan pemesanan dan perlambatan distribusi, serta perbedaan jumlah stok antara catatan administrasi dan inventaris fisik. Situasi ini diperparah dengan temuan bahwa beberapa jenis obat vital sering tidak tersedia sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan terganggunya proses pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi dalam optimalisasi pengelolaan persediaan melalui pelaksanaan audit yang efektif.

Audit salah satu mekanisme pengawasan yang sangat penting dalam pengelolaan persediaan obat-obatan di Puskesmas. Prosedur audit yang efektif memungkinkan manajemen Puskesmas untuk memantau dan mengevaluasi keakuratan serta keandalan data persediaan obat-obatan. Selain itu, audit juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi potensi masalah atau ketidaksesuaian dalam sistem pengelolaan persediaan, seperti kesalahan pencatatan, penyimpangan dari prosedur standar, atau bahkan potensi penyalahgunaan.

Dalam konteks pengelolaan persediaan obat-obatan, audit dapat membantu mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin terjadi, seperti kekurangan stok yang tidak terdeteksi, kelebihan stok yang menyebabkan obat kadaluwarsa, atau ketidaksesuaian antara persediaan fisik dan catatan administrasi. Dengan demikian, prosedur audit yang efektif tidak hanya memastikan kelancaran operasional Puskesmas, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kesehatan.

Puskesmas pematang duku saat ini masih menggunakan sistem pencatatan persediaan obat secara manual dan belum menerapkan sistem prosedur audit yang lebih formal atau terkomputerisasi. Meskipun pencatatan manual telah berjalan

cukup baik, untuk kebutuhan operasional sehari-hari, namun sistem pencatatan manual ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal transparansi dan akurasi data. Dengan tidak adanya prosedur audit yang terstruktur, ada risiko terjadinya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pencatatan yang sulit terdeteksi dengan cepat. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem prosedur audit yang lebih modern dan efisien, guna untuk memastikan pengelolaan persediaan obat yang lebih baik dan akuntabel.

Implementasi prosedur audit dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan persediaan obat-obatan. Dengan melakukan audit, dapat diidentifikasi berbagai titik kelemahan dan potensi risiko dalam proses manajemen persediaan, sehingga dapat disusun strategi mitigasi yang efektif. Secara umum, indikasi adanya permasalahan dalam pengelolaan persediaan obat di puskesmas pematang duku ditemukan dari laporan tahunan yang mengungkap ketidaksesuaian jumlah obat antara data stok disistem dengan kondisi fisik yang sebenarnya.

Tantangan utama yang dihadapi oleh UPT Puskesmas Pematang Duku dalam mengelola persediaan obat-obatan adalah kurangnya implementasi prosedur audit yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan persediaan obat-obatan, sehingga dapat berdampak pada ketersediaan obat yang tidak mencukupi atau bahkan obat yang sudah kadaluwarsa. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prosedur audit juga dapat menyebabkan terjadinya kebocoran persediaan obat-obatan yang dapat merugikan pihak puskesmas.

Dengan mengacu kepada kondisi faktual yang ada, penelitian ini berfokus pada studi kasus implementasi prosedur audit di Puskesmas Pematang Duku sebagai upaya untuk menyempurnakan pengelolaan persediaan obat-obatannya. Maka dengan ini peneliti ingin melakukan sebuah riset tentang: **“Implementasi Prosedur Audit Dalam Pengelolaan Persediaan Obat-Obatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis: Studi Kasus Pada UPT Puskesmas Pematang Duku.”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah utama yang penulis bahas dalam penulisan adalah:

1. Bagaimana mengimplementasikan prosedur audit dalam pengelolaan persediaan obat-obatan di UPT Puskesmas Pematang Duku?
2. Seberapa efektif dan efisien implementasi prosedur audit dalam pengelolaan persediaan obat-obatan di UPT Puskesmas Pematang Duku?
3. Bagaimana perbandingan pengelolaan persediaan obat-obatan di UPT Puskesmas Pematang Duku sebelum dan sesudah diterapkannya prosedur audit antara internal dan eksternal?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus dalam menggali tentang permasalahan penerapan prosedur audit dalam persediaan obat-obatan pada Puskesmas Pematang Duku. Data obat yang akan diteliti merupakan data obat generik yang memiliki tingkat kebutuhan tertinggi sampai tingkat kebutuhan terendah berdasarkan data Lembar Pemakaian dan Lembar permintaan Obat (LPLPO) pada tahun 2023 dan 2024.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur audit dalam pengelolaan persediaan obat-obatan di UPT Puskesmas Pematang Duku. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana prosedur audit telah diterapkan dan efektif dalam mengontrol persediaan obat-obatan di Puskesmas Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien implementasi prosedur audit dalam pengelolaan persediaan obat-obatan di

pusat kesehatan masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat dari prosedur audit dalam meningkatkan kinerja pengelolaan persediaan obat-obatan.

3. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan persediaan obat-obatan di Puskesmas Pematang Duku sebelum dan sesudah penerapan prosedur audit. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak prosedur audit terhadap pengelolaan persediaan obat di puskesmas tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan masalah yang diteliti dan menambah pengetahuan yang diperoleh pada waktu perkuliahan dalam mencari permasalahan yang sesungguhnya dengan terjun langsung kelapangan mengenai implementasi prosedur audit dalam pengelolaan persediaan obat-obatan.

2. Bagi Pihak Puskesmas Pematang Duku

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan masukan bagi petugas puskesmas Pematang Duku untuk perbaikan atas penerapan prosedur audit dalam persediaan obat-obatan.

3. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa lainnya.